

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Ahmad Soleh

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu

ABSTRAK

Ahmad Soleh; *Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Selama periode pengamatan tahun 2001-2011, pertumbuhan ekonomi di Indonesia cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,33% per tahun sedangkan persentase penduduk miskin di Indonesia cenderung mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar 16,13% per tahun. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun tingginya pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak menjamin kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, sebagaimana fenomena yang terjadi di provinsi Papua Barat memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional (11,27% per tahun) namun persentase penduduk miskin di provinsi tersebut menduduki posisi nomor dua tertinggi (35,77%) atau setelah provinsi Papua. Fenomena ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tidak berpihak pada penduduk miskin. Kawasan Barat Indonesia (KBI) memiliki keadaan yang relatif lebih baik jika dibanding dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI) baik dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi maupun kemiskinan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi KBI sebesar 5,45% per tahun diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dan persentase penduduk miskin sebesar 43% sedangkan KTI sebesar 57%. Secara umum Kawasan Timur Indonesia (KTI) serta beberapa daerah yang tergabung dalam kawasan tersebut termasuk dalam kategori daerah tertinggal. Hendaknya pemerintah secara sungguh-sungguh berupaya mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan program-program pengentasan kemiskinan karena secara akumulasi akan berdampak pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan.*

ABSTRACT

Ahmad Soleh; *Economic Growth and Poverty in Indonesia. Purpose of this observation to find out economic growth and poverty in Indonesia using secondary data obtained from Badan Pusat Statistik. During observation period in 2001-2011, the economic growth in Indonesia tend to enhancement experience with growth average 5,33% by year whereas the poverty population percentage in Indonesia is tend to reduction experience with average point 16,13% by year. The high economic growth be expected able to increasing welfare society but the high economic growth in one region not guarantee society welfare in that region, as the phenomenon that happen in West Papua Province which have the highest economic growth average in national (11,27% annually) but the poverty society percentage in West Papua occupy second position (35,77%), this position is after Papua Province. This phenomenon show the economin growth that not take sides at poverty society. Kawasan Barat Indonesia (KBI) has a adequately better condition if it compared with Kawasan Timur Indonesia (KTT) whether is view from economic growth indicator although view from the poverty. The KBI economic growth average is 5,45% annually and it's above of average national economic growth and the percentage of poverty society is 43% while KTI is 57%. Generally Kawasan Timur Indonesia (KTI) and some region that incorporated in that region and included in left behind category. Necessarily, government should taking seriously and also make serious effort to decrease the disparity of development between territory and region economic growth acceleration, and also increase programs poverty reduction because it will take an effect to Indonesia economic matters entirely.*

Kata Kunci: Pembangunan, Disparitas, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan

PENDAHULUAN

Secara umum diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Sedangkan tujuan yang paling penting dari suatu pembangunan adalah pengurangan tingkat kemiskinan yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi

dan/atau melalui redistribusi pendapatan (Kakwani dan Son, 2003). Hal ini dilandasi pada teori *trickle-down effect* yang dikembangkan pertama kali oleh Arthur Lewis (1954) dan diperluas oleh Ranis dan Fei (1968). Teori tersebut menjadi salah satu topik penting di dalam literatur mengenai pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang (*Least Developed Countries/LDCs*) pada dekade 1950-an dan 1960-an.

Teori *trickle-down effect* menjelaskan bahwa kemajuan yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat akan sendirinya menetes ke bawah sehingga menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya akan menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi yang merata. Teori tersebut mengimplikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin yang terjadi dengan sendirinya. Manfaat pertumbuhan ekonomi akan dirasakan penduduk kaya terlebih dahulu, dan kemudian pada tahap selanjutnya penduduk miskin mulai memperoleh manfaat ketika penduduk kaya mulai membelanjakan hasil dari pertumbuhan ekonomi yang telah diterimanya. Dengan demikian, maka pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan angka kemiskinan merupakan efek tidak langsung oleh adanya aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin. Hal ini berarti juga bahwa kemiskinan akan berkurang dalam skala yang sangat kecil bila penduduk miskin hanya menerima sedikit manfaat dari total manfaat yang ditimbulkan dari adanya pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini dapat membuka peluang terjadinya peningkatan kemiskinan sebagai akibat dari meningkatnya ketimpangan pendapatan yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih memihak penduduk kaya dibanding penduduk miskin.

Oleh sebab itu, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berdampak positif bagi pengurangan kemiskinan bilamana pertumbuhan ekonomi yang terjadi berpihak pada penduduk miskin. Siregar (2006) juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan kemiskinan, sedangkan syarat kecukupannya (*sufficient condition*) adalah pertumbuhan ekonomi tersebut harus efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya, pertumbuhan hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin (*growth with equity*). Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja (pertanian atau sektor yang padat karya). Adapun secara tidak langsung, hal itu berarti diperlukan pemerintah yang cukup efektif meredistribusi manfaat pertumbuhan.

Kasus di beberapa negara cukup membuktikan kontribusi pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Kesuksesan negara-negara Asia Timur di tahun 1970-an dan 1980-an menunjukkan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi yang dikombinasi dengan rendahnya ketimpangan pendapatan dapat secara signifikan mengurangi kemiskinan (World Bank, 1993 dalam Cord, 2007). Analisa yang dilakukan oleh Kakwani dan Son (2006) terhadap beberapa negara Asia menunjukkan bahwa selama tahun 1990-an pertumbuhan ekonomi Korea dan Vietnam tergolong *pro-poor*. Analisa yang menggunakan data panel negara-negara berkembang di tahun 1980-an dan 1990-an juga menunjukkan pentingnya pertumbuhan ekonomi bagi penurunan kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Chici Shintia Laksani (2010) yang menganalisis *Pro-Poor Growth* di Indonesia melalui identifikasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Analisa dilakukan melalui data panel 26 propinsi di Indonesia periode 1980-2008. Hasil analisa menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi signifikan berpengaruh terhadap ketimpangan pada periode 1980-2008 dan 1999-2008. Namun demikian, pengurangan kemiskinan kurang didorong oleh efek ketimpangan pendapatan. Pengurangan kemiskinan akibat perubahan ketimpangan pendapatan yang ditimbulkan pertumbuhan ekonomi hanya terjadi pada periode 1999-2008. Sedangkan pertumbuhan ekonomi pada seluruh periode, signifikan berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan. Meskipun demikian, elastisitas bruto dan neto kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi semakin tidak elastis.

Terkait dengan hal tersebut, maka saat ini *pro-poor growth* menjadi salah satu konsep pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara khususnya negara sedang

berkembang, dimana pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai salah satu alat untuk mengurangi kemiskinan. Dalam penelitian ini menggunakan data time series tahun 2000-2011 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia serta melihat pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan antar *region* (provinsi, pulau dan kawasan) di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Wijono (2005), pertumbuhan ekonomi secara singkat merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, pengertian ini menekankan pada tiga hal yaitu proses, output per kapita dan jangka panjang. Proses menggambarkan perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu yang lebih bersifat dinamis, output per kapita mengaitkan aspek output total (GDP) dan aspek jumlah penduduk, sehingga jangka panjang menunjukkan kecenderungan perubahan perekonomian dalam jangka tertentu yang didorong oleh proses intern perekonomian (*self generating*). Pertumbuhan ekonomi juga diartikan secara sederhana sebagai kenaikan output total (PDB) dalam jangka panjang tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih kecil atau lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk dan apakah diikuti oleh pertumbuhan struktur perekonomian atau tidak.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi (Tambunan, 2001). Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Dengan kata lain, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan bila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya. Dalam pengertian ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan Produk Domestik Bruto (PDB), yang berarti peningkatan Pendapatan Nasional/PN.

Menurut Sukirno (2011) pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan PDB atau PNB riil. Sejak lama ahli-ahli ekonomi telah menganalisis faktor-faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan kepada pertumbuhan ekonomi yang berlaku di berbagai negara dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan suatu negara adalah kekayaan sumber alam dan tanahnya, jumlah dan mutu tenaga kerja, barang-barang modal yang tersedia, tingkat teknologi yang digunakan dan sistem sosial dan sikap masyarakat. Beberapa teori telah dikemukakan yang menerangkan hubungan diantara faktor produksi dengan pertumbuhan ekonomi. Pandangan teori-teori tersebut diringkas sebagai berikut:

- i. Teori Klasik: Menekankan tentang pentingnya faktor-faktor produksi dalam menaikkan pendapatan nasional dan mewujudkan pertumbuhan. Akan tetapi yang terutama diperhatikan adalah peranan tenaga kerja. Menurut mereka tenaga kerja yang berlebihan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
- ii. Teori Schumpeter: Menekankan tentang peranan usahawan yang akan melakukan inovasi dan investasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi.
- iii. Teori Harrod-Domar: Mewujudkan peranan investasi sebagai faktor yang menimbulkan pertambahan pengeluaran agregat. Teori ini pada dasarnya menekankan peranan segi permintaan dalam mewujudkan pertumbuhan.
- iv. Teori Neo-Klasik: Melalui kajian empirikal teori ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan peningkatan kemahiran masyarakat merupakan faktor yang terpenting yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan PDB. Ada beberapa alasan yang mendasari pemilihan pertumbuhan PDB dan bukan indikator lainnya (seperti PNB) sebagai pertumbuhan. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Susanti et al (2007) tersebut adalah:

- 1) PDB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian. Hal ini berarti peningkatan PDB juga mencerminkan peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut.
- 2) PDB dihitung atas dasar konsep aliran (*flow concept*). Artinya perhitungan PDB hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan pada satu periode tertentu. Perhitungan ini tidak mencakup nilai produk yang dihasilkan pada periode sebelumnya. Pemanfaatan konsep aliran guna menghitung PDB, memungkinkan untuk membandingkan jumlah output yang dihasilkan pada tahun ini dengan tahun sebelumnya.
- 3) Batas wilayah perhitungan PDB adalah negara (perekonomian domestik). Hal ini memungkinkan untuk mengukur sejauh mana kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi yang diterapkan pemerintah mampu mendorong perekonomian domestik.

Guna menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi, data PDB yang digunakan adalah data PDB riil (atas dasar harga konstan) karena dengan penggunaan data PDB riil, pengaruh perubahan harga terhadap nilai PDB (atas dasar harga berlaku) telah dihilangkan. Dengan demikian, maka pertumbuhan PDB semata-mata hanya

Kemiskinan

Pada tahun 1990, *World Bank* mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi standar hidup minimal. Kemudian pada tahun 2004, *World Bank* menguraikan kembali definisi kemiskinan secara lebih detail yaitu “Kemiskinan adalah kelaparan. Kemiskinan adalah ketiadaan tempat tinggal. Kemiskinan adalah sakit dan tidak mampu untuk periksa ke dokter. Kemiskinan adalah tidak mempunyai akses ke sekolah dan tidak mengetahui bagaimana caranya membaca. Kemiskinan adalah tidak mempunyai pekerjaan dan khawatir akan kehidupan di masa yang akan datang. Kemiskinan adalah kehilangan anak karena penyakit yang disebabkan oleh air yang tidak bersih. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, ketiadaan keterwakilan dan kebebasan”.

Tidak jauh berbeda dengan definisi *World Bank*, UNDP juga mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi kekurangan pendapatan dan kesulitan ekonomi. Namun, kemiskinan juga dipandang sebagai suatu keadaan dimana kurangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan atau air minum yang bersih, atau untuk mempengaruhi proses politik dan faktor lainnya yang penting bagi manusia. Dengan kata lain, UNDP memandang kemiskinan sebagai suatu masalah multidimensi yaitu tidak hanya terbatas pada kekurangan pendapatan dan sumber daya ekonomi.

Adapun definisi kemiskinan yang banyak digunakan di Indonesia terutama dalam pengukuran kemiskinan secara nasional adalah definisi yang dikembangkan oleh BPS. Definisi kemiskinan BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik kebutuhan dasar makanan (2100 kkal/cap/hari) maupun kebutuhan dasar bukan makanan. Sebelumnya, beberapa kelompok atau ahli telah mencoba merumuskan mengenai konsep kebutuhan dasar ini termasuk alat ukurnya. Konsep kebutuhan dasar yang dicakup adalah komponen kebutuhan dasar dan karakteristik kebutuhan dasar serta hubungan keduanya dengan garis kemiskinan. Rumusan komponen kebutuhan dasar menurut beberapa ahli (dalam BPS, 2008) adalah sebagai berikut:

- a) Menurut *United Nations*, komponen kebutuhan dasar terdiri atas kesehatan, bahan makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja dan kondisi pekerjaan, perumahan, sandang, rekreasi, jaminan sosial, dan kebebasan manusia.
- b) Menurut UNSRID, komponen kebutuhan dasar terdiri atas (i) kebutuhan fisik primer yang mencakup kebutuhan gizi, perumahan, dan kesehatan; (ii) kebutuhan kultural yang mencakup pendidikan, rekreasi dan ketenangan hidup; dan (iii) kebutuhan atas kelebihan pendapatan.
- c) Menurut Ganguli dan Gupta, komponen kebutuhan dasar terdiri atas gizi, perumahan, pelayanan kesehatan pengobatan, pendidikan, dan sandang.

- d) Menurut Green (1978), sebagaimana dikutip oleh Thee Kian Wie (1981), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: (i) *personal consumption items* yang mencakup pangan, sandang, dan pemukiman; (ii) *basic public services* yang mencakup fasilitas kesehatan, pendidikan, saluran air minum, pengangkutan, dan kebudayaan.
- e) Menurut Esmara H (1986), komponen kebutuhan dasar primer untuk bangsa Indonesia mencakup pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
- f) Menurut BPS, komponen kebutuhan dasar terdiri dari pangan dan bukan pangan yang disusun menurut daerah perkotaan dan perdesaan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Adapun jenis pangan yang diperhitungkan sebagai kebutuhan dasar adalah padi-padian dan hasil-hasilnya, ubi-ubian dan hasil-hasilnya, ikan dan hasil-hasil ikan lainnya, daging, telur, susu dan hasil dari susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, konsumsi lainnya, makanan yang sudah jadi, minuman yang mengandung alkohol, tembakau, dan sirih. Sedangkan jenis kebutuhan dasar bukan pangan adalah perumahan, bahan bakar, penerangan, dan air; barang-barang dan jasa; pakaian, alas kaki, dan tutup kepala; barang-barang yang tahan lama; keperluan pesta dan upacara.

KERANGKA ANALISIS



Gambar 1. Kerangka Analisis

PEMBAHASAN

Keadaan Struktur Ekonomi Indonesia

Struktur ekonomi dipergunakan untuk menunjukkan komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Sektor yang dominan atau yang diandalkan mempunyai kedudukan yang paling atas dalam struktur tersebut menjadi ciri khas suatu perekonomian. Sektor ekonomi yang dominan adalah sektor ekonomi yang menjadi sumber mata pencaharian sebagian besar penduduk serta menjadi penyerap tenaga kerja yang besar. Dapat juga dikatakan sektor yang memberikan kontribusi yang terbesar terhadap produk nasional dengan laju pertumbuhan yang tinggi, yang menjadi ciri khas perekonomian. Untuk menggambarkan struktur perekonomian dimaksud, berikut disajikan Produk Domestik Bruto atas dasar harga konstan 2000 yang menggambarkan kondisi perekonomian pada tahun 2001-2011 di Indonesia.

Tabel 1 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2001-2011

LAPANGAN USAHA	Tahun					
	2001	2003	2005	2007	2009	2011
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	225.686	240.387	253.882	271.509	295.883	315.036
2. Pertambangan dan Penggalian	168.244	167.604	165.223	171.278	180.200	189.761
3. Industri Pengolahan	398.324	441.755	491.561	538.085	570.102	633.782
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	9.058	10.349	11.584	13.517	17.136	18.921
5. Konstruksi	80.080	89.622	103.598	121.809	140.267	159.993
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	234.273	256.517	293.654	340.437	368.463	437.199
7. Pengangkutan dan Komunikasi	70.276	85.458	109.262	142.327	192.198	241.298
8. Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan	123.086	140.374	161.252	183.659	209.163	236.146
9. Jasa-Jasa	133.957	145.105	160.799	181.706	205.434	232.537
PDB INDONESIA	1.442.985	1.577.171	1.750.815	1.964.327	2.178.850	2.464.676

Sumber: Statistik Indonesia 2001-2011 (diolah)

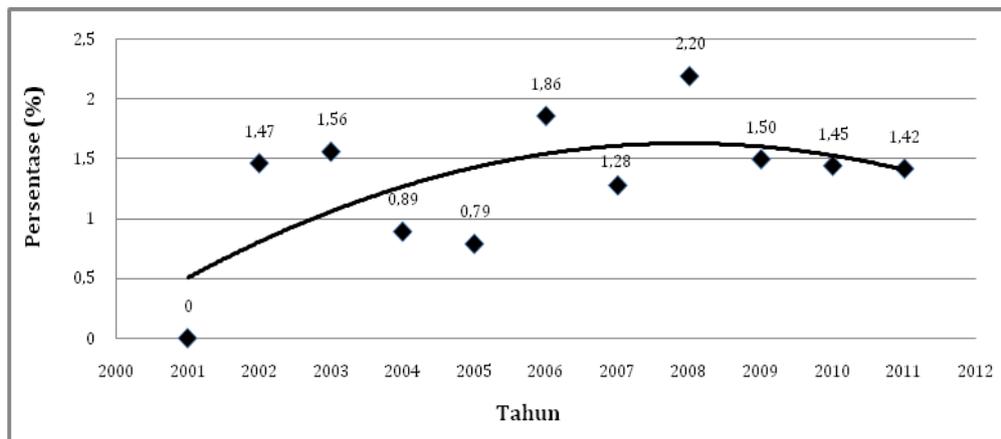
Tabel 1 menggambarkan peranan masing-masing sektor ekonomi terhadap peranannya dalam pembentukan PDB Indonesia periode 2001-2011. Pada periode 2001-2011, tiga sektor utama yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel & restoran serta sektor pertanian, peternakan, kehutanan & perikanan memberikan kontribusi yang besar terhadap pembentukan PDB nasional.

Pada tahun 2001 ketiga sektor tersebut memberikan kontribusi sebesar 59,48 persen. Sektor industri pengolahan memberi kontribusi sebesar 27,60 persen, sektor perdagangan, hotel & restoran memberi kontribusi sebesar 16,24 persen dan sektor pertanian, peternakan, kehutanan & perikanan memberi kontribusi sebesar 15,64 persen. Sedangkan pada tahun 2011 ketiga sektor tersebut memberikan kontribusi sebesar 56,23 persen. Sektor industri pengolahan memberi kontribusi sebesar 25,71 persen, sektor perdagangan, hotel & restoran memberi kontribusi sebesar 17,74 persen dan sektor pertanian, peternakan, kehutanan & perikanan memberi kontribusi sebesar 12,78 persen.

Pertumbuhan Penduduk Indonesia

Hasil olah cepat sensus penduduk 2010 yang diselenggarakan pada bulan Mei 2010 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237.556.363 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 119.507.580 orang dan perempuan sebanyak 118.048.783 orang. Bila dibandingkan dengan hasil sensus penduduk 2000 yang berjumlah 205.132.458 orang, maka selama sepuluh tahun terakhir penduduk Indonesia bertambah sekitar 32,5 juta orang atau meningkat dengan tingkat (laju) pertumbuhan pertahun sebesar 1,49 persen. Trend pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia cenderung meningkat (lihat gambar 2).

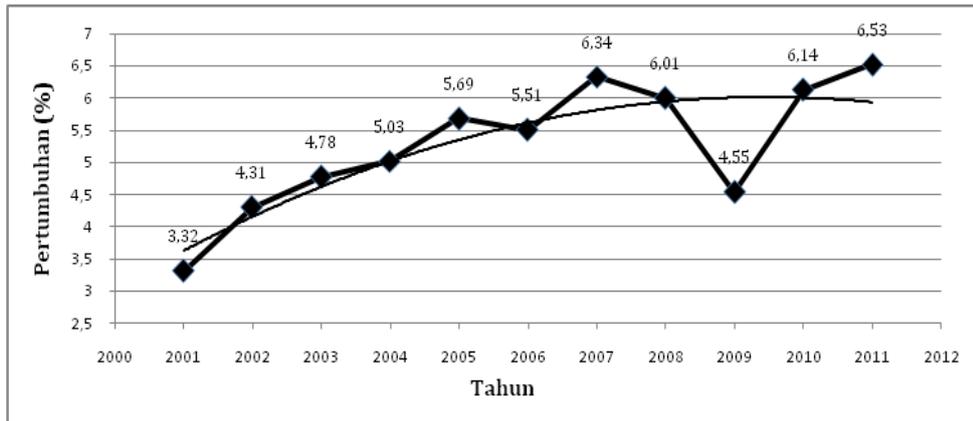
Gambar 2. Pertumbuhan Penduduk Indonesia Tahun 2001-2011



Sumber: Statistik Indonesia 2001-2011 (diolah)

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Indikator agregat ekonomi makro yang lazim digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu wilayah adalah Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tingkat nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat provinsi atau kabupaten. PDRB adalah jumlah dari keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh masing-masing daerah (*region*) pada suatu periode tertentu biasanya satu tahun. Penelitian ini menggunakan data PDRB atas dasar harga konstan tahun 2001. Untuk data PDRB periode 2001-2011 menurut provinsi data diambil langsung dari laporan Badan Pusat Statistik. Sedangkan data PDRB menurut pulau, merupakan penjumlahan dari total PDRB antar provinsi di wilayah tersebut. Begitu halnya dengan data PDRB menurut kawasan, merupakan penjumlahan dari total PDRB menurut provinsi atau pulau di kawasan masing-masing.

Gambar 3. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2001-2011

Sumber: Statistik Indonesia 2001-2011 (diolah)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode pengamatan tahun 2001-2011 sebagaimana ditunjukkan pada gambar 3 mengalami fluktuasi, namun secara umum *trend* pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat. Rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,33% per tahun. Penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2009 yakni mencapai 1,46% atau dari nilai 6,01% menjadi 4,55%. Penurunan ini lebih disebabkan oleh penurunan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di sebagian besar daerah di Kawasan Barat Indonesia (KBI). Hal ini menunjukkan bahwa peranan aktifitas ekonomi di Kawasan Barat Indonesia (KBI) memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia jika dibanding dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI).

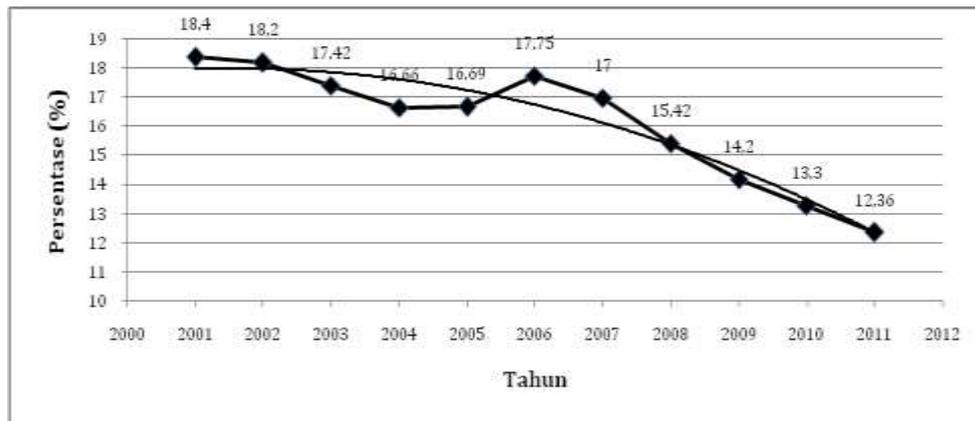
Kemiskinan Di Indonesia

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Kesenjangan antara region di Indonesia (antar provinsi, antar pulau maupun antar kawasan) tidak saja terlihat dari nilai pertumbuhan ekonomi namun juga kesejahteraan masyarakat atau kemiskinan di setiap daerah. Berdasar data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin di Indonesia selama periode pengamatan cenderung menurun. Kondisi ini berbanding terbalik dengan trend pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat. Penurunan persentase penduduk miskin di sebagian besar daerah berdampak secara akumulatif pada persentase penduduk miskin secara nasional.

Persentase penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada periode 2001-2011 rata-rata sebesar 16,13%. Periode 2001-2004 persentase penduduk miskin di Indonesia cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2001 persentase penduduk miskin sebesar 18,40% (37,9 juta jiwa) dan pada tahun 2004 menjadi 16,66% (34,15 juta jiwa). Periode 2005-2006 persentase penduduk miskin di Indonesia cenderung mengalami peningkatan yakni masing-masing 16,69% (36,80 juta jiwa) dan 17,75% (39,30 juta jiwa). Faktor yang menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan pada tahun 2006 antara lain disebabkan oleh naiknya harga kebutuhan pokok dan inflasi umum sebesar 17,95 persen pada Februari 2005 hingga Maret 2006.

Selanjutnya periode 2007-2011 persentase penduduk miskin di Indonesia kembali mengalami penurunan. Tahun 2007 persentase penduduk miskin sebesar 17% (38,39 juta jiwa) atau menurun sebesar 0,75% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 persentase penduduk miskin di Indonesia menjadi 12,36% (29,79 juta jiwa).

Gambar 4. Persentase Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2001-2011



Sumber: Statistik Indonesia 2001-2011 (diolah)

Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Menurut Provinsi Di Indonesia

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki wilayah yang sangat luas. Perbedaan kondisi demografis, kandungan sumber daya alam, kelancaran mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah serta alokasi dana pembangunan antar wilayah merupakan faktor yang memicu terjadinya perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan antar daerah di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi menurut provinsi di Indonesia selama periode pengamatan tahun 2001-2011 cukup beragam. Terdapat beberapa provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi atau di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional namun terdapat juga beberapa provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah baik jika dibandingkan dengan daerah sekitar atau dengan rata-rata nasional.

Selama periode pengamatan, terdapat 60,61% atau sebanyak 20 provinsi yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional (5,33%). Lima provinsi yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi atau berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yaitu; (1) Provinsi Papua Barat memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi 11,27%. Tingginya rata-rata pertumbuhan ekonomi di provinsi Papua Barat disebabkan oleh tingginya pertumbuhan ekonomi dalam dua tahun terakhir, pada tahun 2010 provinsi Papua Barat memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi yakni mencapai 36,76% dan pada tahun 2011 sebesar 27,22%. (2) Provinsi Sulawesi Tengah memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi 7,79%. Provinsi ini memiliki pertumbuhan ekonomi relatif stabil disetiap tahunnya yakni berkisar antara 5,62% sampai dengan 9,96%. (3) Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi 7,66%. Provinsi ini juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2008 yakni sebesar 12,59% sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2010 yakni sebesar, 3,09%. (4) Provinsi Banten memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi 7,32%. Pertumbuhan ekonomi di provinsi Banten cenderung stabil, hanya pada tahun 2008 memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi yakni sebesar 22,53%, sedangkan pada tahun yang lain selama periode pengamatan, pertumbuhan ekonomi berkisar antara 4,69% sampai dengan 6,43%. (5) Provinsi Gorontalo memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi 7,29%. Provinsi Gorontalo dapat dikatakan sebagai provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang paling stabil jika dibanding dengan provinsi lain. Pertumbuhan ekonomi selama periode pengamatan berkisar antara 6,51% sampai dengan 7,76%.

Sedangkan provinsi yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi yang rendah atau di bawah rata-rata nasional yakni sebanyak 39,39% atau 13 provinsi. Lima diantaranya adalah (1) Provinsi Papua memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi 0,07%. Berbeda halnya dengan provinsi Papua Barat yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi, provinsi Papua justru memiliki pertumbuhan ekonomi terendah. Rendahnya nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi ini diantaranya disebabkan oleh tidak stabilnya pertumbuhan ekonomi disetiap

tahunnya. Selama periode pengamatan. (2) Provinsi Riau memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi 1,16%. rendahnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di provinsi Riau diantaranya disebabkan oleh rendahnya nilai pertumbuhan ekonomi disetiap tahunnya bahkan pada tahun 2003 mengalami pertumbuhan ekonomi negatif sebesar -24,56%. (3) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 1,20%. Rendahnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di provinsi ini juga disebabkan oleh tidak stabilnya nilai pertumbuhan ekonomi yang terjadi, selama periode pengamatan terjadi lima pertumbuhan ekonomi negatif. (4) Provinsi Kalimantan Timur memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi 2,94%. Provinsi Kalimantan Timur sebenarnya merupakan salah satu provinsi yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang tinggi, namun pertumbuhan ekonomi yang terjadi disetiap tahun relatif kecil baik jika dibandingkan dengan wilayah kepulauan maupun secara nasional. (5) Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 4,11% pertahun. Selama periode pengamatan, pertumbuhan ekonomi di provinsi ini mengalami fluktuasi. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2009 yakni sebesar 12,11% sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2011 yakni sebesar -3,18%.

Ditinjau dari aspek kemiskinan, persentase penduduk miskin yang terjadi di masing-masing provinsi di Indonesia sangat bervariasi. Terdapat provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin yang sangat kecil namun juga terdapat provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin yang sangat besar. Provinsi dengan rata-rata persentase penduduk miskin terkecil diantaranya adalah (1) Provinsi DKI Jakarta yakni sebesar 3,73%, (2) Provinsi Bali sebesar 6,38%, (3) Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 7,32%, (4) Provinsi Banten sebesar 8,43% dan (5) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 8,87%. Kelima provinsi tersebut juga memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

Provinsi dengan rata-rata persentase penduduk miskin terbesar/terbanyak diantaranya adalah (1) Provinsi Papua yakni sebesar 38,82%, (2) Provinsi Papua Barat sebesar 35,77%, (3) provinsi Maluku sebesar 29,88%, (4) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 27,06% dan (5) Provinsi Gorontalo sebesar 26,70%. Kelima provinsi yang memiliki rata-rata persentase penduduk miskin terbanyak sebagaimana tersebut di atas merupakan provinsi-provinsi yang berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kondisi kontradiktif terjadi di provinsi Papua Barat, dimana provinsi ini memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional (11,27%) namun persentase penduduk miskin di provinsi menduduki posisi nomor dua (35,77%) atau setelah provinsi Papua. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pembangunan yang terjadi di daerah tersebut tidak menyebar ke masyarakat lapisan bawah atau dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta mampu menurunkan jumlah atau persentase penduduk miskin di daerah tersebut.

Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Menurut Pulau Di Indonesia

Pertumbuhan ekonomi ditinjau dari aspek kepulauan dapat disampaikan bahwa wilayah kepulauan yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah adalah (1) Pulau Sulawesi memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6,74% per tahun. Tingginya rata-rata pertumbuhan ekonomi di wilayah ini tidak terlepas dari kontribusi pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi rata-rata provinsi di pulau Sulawesi dapat dikatakan relatif merata yakni berkisar antara nilai rata-rata pertumbuhan 5,52% sampai dengan 7,79%. (2) Pulau Jawa & Bali memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,69%. Provinsi yang memberikan kontribusi yang tinggi dalam pembentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa & Bali adalah provinsi Banten yakni sebesar 7,32% sedangkan provinsi D.I Yogyakarta memberikan kontribusi yang rendah yakni sebesar 4,64%. (3) Pulau Sumatera memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80%. Terdapat kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar provinsi di pulau Sumatera. Provinsi yang memberikan kontribusi yang tinggi dalam pembentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi di pulau Sumatera adalah provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni sebesar 6,66% sedangkan provinsi Riau memberikan kontribusi yang rendah yakni sebesar 1,16%. (4) Kepulauan Lainnya

yang terdiri atas pulau Papua, Maluku serta Nusa Tenggara memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 4,09%. Provinsi yang memberikan kontribusi yang tinggi dalam pembentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Lainnya adalah provinsi Papua Barat yakni sebesar 11,27% sedangkan provinsi Papua memberikan kontribusi yang rendah yakni sebesar 0,07%. Kesenjangan pertumbuhan ekonomi terjadi di pulau Papua sedangkan pertumbuhan ekonomi di pulau Maluku dan Nusa Tenggara relatif lebih merata. (5) Pulau Kalimantan memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah jika dibanding dengan empat pulau lainnya yakni sebesar 3,98%. Rendahnya rata-rata pertumbuhan ekonomi yang terjadi di provinsi Kalimantan Timur turut memicu rendahnya nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi di pulau Kalimantan.

Selanjutnya ditinjau dari aspek kemiskinan, Kepulauan Lainnya merupakan wilayah yang memiliki persentase penduduk miskin tertinggi jika dibanding dengan pulau lainnya. Selama periode pengamatan, Kepulauan Lainnya memiliki nilai rata-rata persentase penduduk miskin sebesar 29,98%. Tingginya persentase penduduk miskin di sebagian besar provinsi di Kepulauan Lainnya memberikan kontribusi secara akumulatif terhadap persentase penduduk miskin di Kepulauan Lainnya. Provinsi yang memiliki nilai rata-rata persentase penduduk miskin terbanyak adalah provinsi Papua sebanyak 38,82% sedangkan provinsi yang memiliki nilai rata-rata persentase penduduk miskin terkecil adalah Provinsi Maluku Utara yakni sebesar 11,94%. Fenomena ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Lainnya atau wilayah paling timur Indonesia cenderung lebih rendah jika dibanding dengan pulau lain atau di Kawasan Barat Indonesia.

Pulau Sumatera juga memiliki nilai rata-rata persentase penduduk miskin yang tinggi setelah Kepulauan Lainnya yakni sebesar 27,05%. Provinsi yang memiliki nilai rata-rata persentase penduduk miskin terbanyak di pulau Sumatera adalah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yakni sebesar 27,05% sedangkan terkecil adalah provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni sebesar 8,87%. Pulau Sulawesi memiliki nilai rata-rata persentase penduduk miskin lebih rendah jika dibanding dengan pulau Sumatera yakni sebesar 19,66%. Provinsi Gorontalo merupakan provinsi yang memiliki nilai rata-rata persentase penduduk miskin terbanyak di pulau Sulawesi yakni sebesar 26,70% sedangkan terkecil adalah provinsi Sulawesi Utara yakni sebesar 10,83%. Dua pulau selanjutnya yang memiliki nilai rata-rata persentase penduduk miskin terkecil masing-masing adalah pulau Kalimantan (7,35%) dan Pulau Jawa & Bali (15,95%). Ditinjau dari aspek kepulauan, kesejahteraan masyarakat di pulau Kalimantan dianggap lebih baik jika dibanding dengan masyarakat yang berada di pulau lain. Hal tersebut tercermin pada rendahnya persentase penduduk miskin di masing-masing provinsi yang berada di pulau Kalimantan yakni berkisar antara nilai 7,32% - 13,98%.

Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Menurut Kawasan Di Indonesia

Indonesia terbagi atas dua kawasan yakni Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kawasan Barat Indonesia terdiri atas pulau Sumatera dan pulau Jawa & Bali sedangkan Kawasan Timur Indonesia terdiri atas pulau Kalimantan, pulau Sulawesi dan Kepulauan Lainnya. Kesenjangan pembangunan ekonomi antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) baik ditinjau dari aspek pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia, pendidikan, komunikasi maupun infrastruktur telah menjadi perhatian pemerintah Indonesia sejak lama. Seperti pembentukan Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (DP-KTI) pada tahun 1993 dan pembentukan Kementerian Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (PPKTI) pada tahun 2000. Selanjutnya tahun 2010 yang merupakan sasaran jangka menengah dalam upaya pemerataan pembangunan khususnya wilayah yang kurang berkembang seperti Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan daerah terpencil dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI) kesenjangan masih terjadi.

Kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) terlihat pada perbandingan nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi dan nilai rata-rata persentase penduduk miskin. Selama periode pengamatan tahun 2001-2011, Kawasan Barat Indonesia (KBI) memiliki nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi jika dibanding

dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI) yakni sebesar 5,45% per tahun di atas rata-rata nasional (5,33% per tahun). Pulau Jawa & Bali memberikan kontribusi yang lebih tinggi dalam pembentukan nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kawasan Barat Indonesia (KBI) jika dibanding dengan pulau Sumatera. Selanjutnya Kawasan Timur Indonesia (KTI) memiliki nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata nasional yakni sebesar 4,71% per tahun. Rendahnya pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) ini disebabkan oleh akumulasi pertumbuhan ekonomi yang terjadi di pulau pada kawasan tersebut seperti pulau Kalimantan dan Kepulauan lainnya. Sedangkan pulau Sulawesi memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi yang tinggi (6,74% per tahun) jika dibanding dengan pulau lain di Indonesia.

Selain melihat aspek pertumbuhan ekonomi, kesenjangan juga terlihat pada nilai rata-rata persentase penduduk miskin di kedua kawasan tersebut. Persentase penduduk miskin di Kawasan Barat Indonesia (KBI) lebih rendah jika dibanding dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Rata-rata persentase penduduk miskin Kawasan Barat Indonesia (KBI) sebesar 43% sedangkan rata-rata persentase penduduk miskin Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebesar 57%. Dengan melihat indikator pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, dapat disampaikan bahwa kondisi Kawasan Barat Indonesia (KBI) relatif lebih baik jika dibanding dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan ini merupakan tugas pemerintah pusat dan daerah dalam melanjutkan atau menyusun alternatif kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya Kawasan Timur Indonesia (KTI) serta memperkecil disparitas pembangunan dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode pengamatan tahun 2001-2011 cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,33% per tahun sedangkan persentase penduduk miskin di Indonesia cenderung mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar 16,13% per tahun.
2. Provinsi dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Papua Barat dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 11,27% per tahun sedangkan provinsi dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah adalah Papua dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 0,07% per tahun. Selanjutnya ditinjau dari aspek kemiskinan, provinsi dengan persentase kemiskinan tertinggi adalah provinsi Papua yakni sebesar 38,82% per tahun sedangkan provinsi dengan persentase kemiskinan terendah adalah provinsi DKI Jakarta sebesar 3,73% per tahun.
3. Pulau dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah pulau Sulawesi memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6,74% per tahun sedangkan pulau dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah adalah pulau Kalimantan sebesar 3,98% per tahun. Ditinjau dari aspek kemiskinan, pulau dengan persentase kemiskinan tertinggi adalah pulau Sumatera yakni sebesar 27,05% per tahun sedangkan pulau dengan persentase kemiskinan terendah adalah pulau Kalimantan sebesar 7,35% per tahun.
4. Kawasan Barat Indonesia (KBI) memiliki keadaan yang relatif lebih baik jika dibanding dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI) baik dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi maupun kemiskinan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi KBI sebesar 5,45% per tahun di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dan persentase penduduk miskin sebesar 43% sedangkan KTI sebesar 57%.
5. Tingginya pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak menjamin kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, sebagaimana fenomena yang terjadi di provinsi Papua Barat memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional (11,27% per tahun) namun persentase penduduk miskin di provinsi tersebut menduduki posisi nomor dua (35,77%) atau setelah provinsi Papua. Fenomena ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tidak berpihak pada penduduk miskin.

SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terjadi kesenjangan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan antar *region* (daerah) di Indonesia. Secara umum Kawasan Timur Indonesia (KTI) serta beberapa daerah yang tergabung dalam kawasan tersebut termasuk dalam kategori daerah tertinggal. Hendaknya pemerintah secara sungguh-sungguh berupaya mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan program-program pengentasan kemiskinan karena secara akumulasi akan berdampak pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Untuk itu saran yang dapat diberikan kepada pemerintah adalah:

1. Bagi pemerintah daerah hendaknya mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah.
2. Berbagai kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia harus dilaksanakan secara multisektor dengan dukungan berbagai pihak. Beberapa daerah perlu penangan yang serius dalam penanggulangan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2001-2011. *Statistik Indonesia*, BPS Jakarta Indonesia, Indonesia.
- Cord, Louise. 2007. *Delivering on the Promise of Pro-Poor Growth-Insight and Lessons from Country Experiences: Overview*. Copublication of Palgrave Macmillan and the World Bank.
- Kakwani, N dan Son, HH. 2003. *Pro-poor Growth: Concepts and Measurement with Country Case Studies*. The Pakistan Development Review, 42: 4 Part 1 pp 417-444.
- Kakwani, N dan Son, HH. 2006. *Pro-Poor Growth: The Asian Experience*. UNU World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER). Research Paper No. 2006/56.
- Laksani, Chichi Shintia. 2010. (*online*) (diakses pada 12 Oktober 2013) tersedia di <http://lontar.ui.ac.id/>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Siregar, H. 2006. *Perbaikan Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi: Mendorong Investasi dan Menciptakan Lapangan Kerja*. Jurnal Ekonomi Politik dan Keuangan. INDEF. Jakarta.
- Soleh, Ahmad. 2012. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pembangunan Ekonomi Antar Region Di Indonesia Tahun 2001-2010*. Jurnal Ekonomi Dan Perencanaan Pembangunan (JEPP) Volume:04.No.03.
- Sukirno, Sadono. 2011. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Susanti et al. 2007. *Indikator-Indikator Makroekonomi*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Tambunan, Tulus. 2001. *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Wijono, Wiloejo, Wiryo. 2005. *Mengungkap Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dalam Lima Tahun Terakhir*, Jurnal Manajemen dan Fiskal, Volume V, Nomor 2, Jakarta.